



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

Jl. Gajah Mada No : 36 Telp. (0543) 21013 Fax. (0543) 22887

TANA PASER

NOTULEN RAPAT DENGAR PENDAPAT PANSUS RAPERDA IV DPRD KABUPATEN PASER

A. DASAR

1. Rapat Banmus Tanggal 1 November 2021 membahas jadwal kegiatan DPRD Kab.Paser Bulan November 2021.
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor : 172.15/ 424 /DPRD, tanggal 8 November 2021, Perihal Undangan.

B. WAKTU DAN TEMPAT

Hari : Senin
Tanggal : 15 November 2021
Pukul : 10.00 Wita
Tempat : Ruang Rapat Balekambang DPRD Kab.Paser

C. PIMPINAN RAPAT

Rapat ini dipimpin oleh H. Hendrawan Putra ST, Selaku Ketua Pansus Raperda IV DPRD Kab.Paser.

D. PESERTA RAPAT

1. H. Abdullah, SE
2. Basri M., S.AP
3. Hamransyah, S.H

E. HASIL PEMBAHASAN :

1. Pembukaan

Rapat pada hari ini dibuka oleh H. Hendrawan Putra, ST Selaku Ketua Pansus Raperda IV DPRD Kab. Paser.

Rapat di hadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kab. Paser dan Anggota Pansus Raperda IV yang hadir dalam rapat sebanyak 3 (tiga) orang dan 6 (enam) orang ijin.

2. Pembahasan

Raperda Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kaltimara.

- Pimpinan BPD Kaltimara mengatakan:
 - ✓ Kami Sangat mengapresiasi atas besaran nominal 22,5 M selama 3 tahun. Dan mengucapkan terima kasih kepada ketua dan anggota DPRD kab.Paser khususnya pansus 4 yang sudah berkenan membahas raperda ini dan memberikan dukungan ke pada BPD Kaltimara.
 - ✓ Modal saham kita sekarang sebesar 125.565.000.000 dan jumlah deviden sebesar 114.096.243.550,88. Kami berharap penyertaan modal bisa lebih dari 22,5 M karna target saya kemarin bisa menggeser Balikpapan yang berada di posisi 6 tetapi kami juga memahami kondisi keuangan daerah dan situasi pandemi Covid 19, Jadi kita menyerahkan ke Pemerintah daerah sebagai pemilik.
 - ✓ Akta pernyataan keputusan RUPS PT. BPD Kaltim Kaltara tahun 2020 nomor 03 tanggal 13 April 2021 menyebutkan bahwa menyetujui penambahan setoran modal saham perseroan selama tahun 2021 dengan total sebesar 500 M dari masing-masing pemerintah provinsi pemerintahan kabupaten dan pemerintah kota se-Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara baik dalam bentuk uang yang bersumber dari APBD masing-masing pemerintah daerah maupun dalam bentuk lainnya. Dan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota se Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara mendukung dan berkontribusi dalam penambahan setoran modal saham perseroan yang digunakan sebagai pemisahan atau Spin Off atau Unit Usaha Syariah menjadi Badan Usaha Syariah dengan tetap memperhatikan ruang penyertaan modal pemilik yang telah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
 - ✓ Ada Amanah dari OJK yang harus dipenuhi oleh semua bank di Indonesia yang memiliki Unit Usaha Syariah, maka paling lambat tahun 2023 harus merubah menjadi Badan Usaha Syariah. Untuk dapat menjadi Badan Usaha Syariah itu harus dilakukan Spin Off / pemisahan yang konsekuensinya bank Kaltimara Konvensional harus menyediakan modal atau memangkas modal yang ada sebesar 500 M. jika itu tidak bisa dilakukan sampai 2023, maka bursa Syariah ini harus merger dengan bursa Syariah lainnya yang dimiliki BPD lain. Proyeksinya dengan BPD Kaltara dengan BPD Kalsel.
 - ✓ Kebutuhan penyertaan modal ini sangat penting bagi kami untuk meningkatkan penyaluran kredit di tahun 2022.

- ✓ Penyaluran kredit nasabah-nasabah Kabupaten Paser sampai 30 Oktober 2021 sebesar 841 M. dari total yang disetor 125,5 M kami sudah menyalurkan kredit sebesar 841 M. kekurangannya di ambil dari dana-dana pihak ke 3 yang kita himpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito, dana giro dll.
- ✓ Ada penambahan target rencana penyaluran kredit sekitar 5 % dari posisi sekarang di angka 42 M untuk tahun 2022. Untuk itulah kami sangat memerlukan penyertaan modal ini untuk memperkuat permodalan dalam rangka untuk penyaluran kredit di tahun 2022 nanti.
- Hamransyah SH mengatakan setuju jika menaikkan peringkat minimal menurunkan Balikpapan. Dan berharap raperda ini di buat pertahun karna kita tidak tahu kedepannya seperti apa. Saya menginginkan laporan penyertaan modal di sampaikan ke DPRD karna kami memiliki fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
- Tanggapan dari Pimpinan BPD Kaltimara : Setiap tahun kita ada melaporkan penyertaan modal kepada Pemkab, kedepannya kita juga akan menyampaikan ke DPRD untuk laporan dan apa saja yang sudah dilakukan. kemungkinan di awal tahun setelah laporan keuangan itu di audit oleh Akuntan Publik. Dan kami tidak mempermasalahkan jika raperda ini dibuat pertahun.
- Bagian Hukum mengatakan dulu Perda ini di buat per 5 Tahun 2015-2020 dengan berdasarkan keinginan bersama DPRD di karenakan setiap tahunnya isi perda tersebut sama saja hanya yang berbeda di nominalnya. raperda ini mau dibuat per 1 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun tidak ada masalah tergantung kesepakatan. Kalaupun nanti ada perubahan nominal, tinggal di usulkan kembali perubahannya. Tiap tahun perbedaannya hanya pada pencairannya, untuk per 5 tahun cukup dengan SK bupati karna dasarnya sudah ada Perda. Jika raperda di buat pertahun maka harus menunggu perda itu di sahkan baru bisa dicairkan.
- Basri M., S.AP mengatakan pada pertemuan sebelumnya saya mengatakan perlu untuk memasukkan klausul pasal mengenai peruntukan deviden yang di pertanggungjawabkan oleh bupati agar raperda ini lebih jelas dan terarah. Dan berharap penyertaan modal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan ke masyarakat agar mempermudah birokrasi seperti urusan kredit UMKM dan lain-lain.

- Tanggapan Bagian Hukum : terkait deviden mungkin kesepakatan saja, walaupun mau dimasukkan dalam klausul untuk disertakan lagi dalam penyertaan modal, kami persilahkan untuk dimuat dalam pasal ini tetapi jika suatu saat daerah membutuhkan dana deviden tersebut tidak bisa digunakan karna ada kewajiban dalam perda ini harus disertakan kembali.
- Bagian Ekonomi : mengatakan setuju perlu ada kepastian agar target 22,5 M ada batas waktunya selama 3 tahun dan setuju jika Raperda ini di buat 3 tahun.
- H. Abdullah SE mempertanyakan penyertaan modal ini jika sudah disertakan apakah kewenangan sepenuhnya ada di Bank Kaltimara atau pemerintah masih ada kewenangannya ? dan berharap agar di adakan program- program unggulan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat misalnya kredit ringan untuk masyarakat kabupaten paser.
- Tanggapan Pimpinan BPD Kaltimara : kewenangan itu ada pada saat RUPS. Di RUPS direksi sebagai pengelola ditunjuk pemegang saham untuk menyampaikan laporan-laporannya terhadap kinerja bank secara umum tahun sebelumnya dan apa yang akan dilakukan pada tahun depannya, anggaran tahun depannya, kami melaporkan kepada bupati sebagai resenpasi dari pemkab, apakah pemkab ada kewenangan terhadap dana itu, karna ini sifatnya umum dana itu dikelola oleh menejemen bank kaltim untuk beberapa hal jadi berbeda dengan yang ada misalnya penyertaan terhadap penugasan terhadap perusda misalnya atau perumda tirta kandilo, kalau dikami sifatnya umum, atau ada juga sifatnya urgensi, Ketika ada isu-isu yang sifatnya urgen diadakan lagi bukan sekali di adakan beberapa kali dalam setahun itu terkait pengawasan pemilik terhadap dana oprasional bank dan dana setoran modal yang diberikan. kredit tanpa bunga sebenarnya bisa tetapi subsidi ditanggung oleh pemkab, kita sebagai bank tidak dapat dilepaskan dari keuangan daerah dan keuangan negara ada regulasi-regulasi yang harus kita patuhi tidak boleh ada kerugian dalam operasional bank jika ada kerugian menjadi objek dari permasalahan hukum bisa menjadi tipikor.
- H. Abdullah SE, mengkritisi program-program yang sudah di paparkan tadi harus mengena kemasyarakat, Tidak perlu lagi dana csr untuk pemerintah daerah seperti pengadaan kendaraan Bapenda, dan kendaraan oprasional RSUD Panglima Sebaya. tidak perlu bantuan karna pengadaan kendaraan oprasional dapat di anggarkan dalam APBD .Sebaiknya anggaran csr dari

BPD Kaltimara dapat digunakan untuk bantuan Tandon, pembuatan sumur bor dan pengadaan air bersih agar bersentuhan langsung kepada masyarakat kabupaten paser.

- Tanggapan Pimpinan BPD Kaltimara : untuk masyarakat juga kami sudah laksanakan program csr misalnya untuk kegiatan olahraga, rohaniawan dll. Untuk tahun 2021 kami sudah mengeluarkan sebesar 108 juta dan untuk RSUD Panglima Sebaya awalnya adalah ambulans, kemudian RSUD Panglima Sebaya mendapatkan bantuan dari pusat maka RSUD Panglima Sebaya mengusulkan kepada kami untuk di ubah menjadi kendaraan operasional. Pemkab tidak meminta langsung bantuan kepada BPD Kaltimara, biasanya dari dinas bersangkutan meminta langsung dan BPD akan memberikan dengan pertimbangan efisiensi dan cost benefit. terkait bantuan untuk masyarakat, kami sangat terbuka jika ada permohonan proposal ke kami akan di tindak lanjuti.
- Hamransyah SH mengatakan saat ini PDAM kita memerlukan modal sebesar 64 M untuk pengembangan bisnisnya. Saya menginginkan Bank Kaltimara bisa berkomunikasi dengan baik mengenai kesulitan dari PDAM.
- Tanggapan Pimpinan BPD Kaltimara :,kami belum mendapatkan informasi bahwa PDAM membutuhkan dana sebesar 64 M, LDR kita selama ini masih rendah sekitar 43% masih terbuka luas untuk penyaluran kredit. Untuk LDR minimal angka 80% dianggap aman oleh OJK, jika ada permintaan dari PDAM , kami sangat senang sekali, akan kami tindak lanjuti.

F. PENUTUP

Demikian notulen ini dibuat digunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Rapat,



H. Hendrawan Putra ST